

Biografi Singkat Penulis

Sobri adalah Dosen Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Ahmad Atory bin Hussain bekerja di Pusat pengkajian sains kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia.

Askarial adalah Dosen Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Syahrul Akmal Latif adalah Dosen Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

H.M. Herdi Salioso adalah Dosen Luar Biasa pada Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Serta pada saat ini bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau.

Raihana adalah Dosen Luar Biasa Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Ahmad Fitra Yuza adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Dian eka Ramhawati adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rosmayani adalah Dosen Jurusan Administrasi pada Program Studi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

H. Ahmad Tarmizi Yusa adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Nurmasari adalah Alumni pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Ranggi Ade Febrian adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

H. Isril adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Cutra Aslinda adalah Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Yasir adalah Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru.



- ◆ **Konflik dan Kekerasan antara Masyarakat Melayu Tambusai dengan Property**
Sobri
- ◆ **Peran Baru Wakil Rakyat di Malaysia suatu Kajian Transformasi Globalisasi.**
Ahmad Atory bin Hussain
- ◆ **Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketahanan Indonesia.**
Askarial
- ◆ **Profil dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Permukiman Kumuh di Kota Dumai.**
Syahrul Akmal Latif - H.M. Herdi Salioso.
- ◆ **Latar Belakang Psikologi Koruptor.**
Raihana
- ◆ **Analisis Peran dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri.**
Ahmad Fitra Yuza - Dian Eka Rahmawati
- ◆ **Analisis Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Pekanbaru.**
Rosmayani - H. Ahmad Tarmizi Yusa - Nurmasari
- ◆ **Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Upah Minimum Kota Pekanbaru pada Tahun 2007.**
Ranggi Ade Febrian - H. Isril
- ◆ **Representasi Komunikasi Politik Tabrani Rab (Studi Biografi & Analisis Rubrik Kolom Tempias di Harian Riau Pos).**
Cutra Aslinda - Yasir

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (JIS)	Vol. 4	No. 1	Halaman 1 - 178	Pekanbaru April 2011	197
-------------------------------	--------	-------	-----------------	----------------------	-----

Volume 4, Nomor 1, April 2011

ISSN : 1979-2840

JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL (JIS)

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (JIS) adalah jurnal kajian Politik, Pemerintahan, Administrasi Publik, Administrasi Bisnis dan Kriminologi. Terbit dua kali setahun, yakni pada bulan April dan bulan Oktober. Jurnal ini diterbitkan sebagai media untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan akademisi dan para peneliti di bidangnya masing-masing. Semua tulisan yang dimuat adalah hasil penelitian dan kajian ilmiah kritis dalam bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik

Ketua Penyunting / Penanggung Jawab

Arief Rifai H.

Sekretaris Penyunting

Kartius

Bendahara

Rosmayani

Penyunting Pelaksana

Rahyunir Rauf

Zulkifli

Indra Syafri

Syaffhendri

Syahrul Akmal Latif

Seno Himala Putra

Layout

Moris Adidi Yogja

Tata Usaha / Sirkulasi

Zulkifli Nur

Penerbit

CV. Julang Ilmu

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Telp. 0761) 674635 Ext. 201; Fax. (0761) 674834
HP. 0815-37538937. E-Mail: modernisasi_fisipoluir08@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT., Jurnal Ilmu Sosial (JIS) Volume 4, Nomor 1 Edisi April 2011 bisa kembali terbit sebagaimana mestinya. Meskipun berbagai rintangan dihadapi oleh redaksi untuk terbitnya edisi ini. Namun riak-riak kecil tersebut tidaklah menjadi hambatan, tetapi kami jadikan sebagai tantangan untuk bisa bertahan dan lebih baik di masa mendatang.

Redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh "Mitra Bestari" yang secara khusus menyediakan waktu, tenaga dan pemikirannya secara maksimal dalam membantu redaksi untuk mengkritisi, mengkoreksi dan menilai kelayakan tulisan-tulisan yang akan dimuat dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga redaksi sampaikan kepada para penulis, yang telah mempercayakan tulisannya untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 4, Nomor 1 ini. Kerjasama yang baik tersebut tetap kami harapkan pada terbitan-terbitan mendatang.

Akhirnya, terbitnya jurnal ilmiah ini tak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari tim redaksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun pada akhirnya pembaca yang akan menyimpulkan dan menilai hasil kerja tersebut. Harapan kami sederhana, semoga apa yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, merangsang inspirasi dan pemikiran-pemikiran inovatif bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik kedepan.

Selamat membaca!

Pekanbaru, April 2011

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

- ↳ **KONFLIK DAN KEKERASAN ANTARA MASYARAKAT MELAYU
TAMBUSAI DENGAN PT. TORGANDA PROPERTY**
Sobri, M.A., S.Ip
- ↳ **PERAN BARU WAKIL RAKYAT DI MALAYSIA SUATU KAJIAN
TRANSFORMASI POLITIK ERA GLOBALISASI**
Ahmad Atory Bin Hussain, Ph.D. Profesor
- ↳ **EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KON
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**
Askarial, MH., SH
- ↳ **PROFIL DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH KOTA DUMA
Syahrul Akmal Latif, DR - H.M. Herdi Solioso, DR., MH.**
- ↳ **LATAR BELAKANG PSIKOLOGI KORUPTOR.....**
Raihana, MA., SH
- ↳ **ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN WONOGIRI**
Ahmad Fitra Yuza, MA., S.IP - Dian Eka Rahmawati, M.Si., S.I.
- ↳ **ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGA
DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS**
Rosmayani, M.Si., S.Sos - H. Ahmad Tarmizi Yusa, DR., MA., Drs. - Nurmas
- ↳ **PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINT
TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI DI KOTA PE
PADA TAHUN 2007**
Ranggi Ade Febrian, M.Si., S.Ip - H. Isril, MH., Drs.
- ↳ **PREPRESENTASI KOMUNIKASI POLITIK TABRAN
(Studi Biografi & Analisis Framing Rubrik Kolom Tempias
di Harian Riau Pos)**
Cutra Aslinda, S.I.Kom - Yasir, M.Si

Dari tugas dan wewenang Komisi Konstitusi tersebut terlihat, bahwa dimasukkannya tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka penyusunan konstitusi dan untuk merumuskan naskah konstitusi merupakan tujuan utama dari pembentukan Komisi Konstitusi. Sedangkan tugas dan wewenang untuk melakukan upaya untuk menerima masukan dan sosialisasi naskah pada publik dimaksudkan untuk melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam penyusunan konstitusi.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka keberadaan Komisi Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sangat diperlukan, karena perubahan (amandemen) UUD 1945 memang membutuhkan suatu badan yang independen dan mandiri dalam melakukan perubahan tersebut, tanpa adanya campur tangan politik dan kekuasaan, sebagaimana perubahan yang telah dilakukan oleh MPR yang sangat sarat dengan muatan politisnya. Dengan adanya Komisi Konstitusi maka diharapkan dapat memberikan kontribusi perubahan (amandemen) UUD 1945 yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga mempunyai daya laku yang kuat sehingga tidak terjadi tambal sulam secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Teori Perundang-undangan. Jeremy Bentham, Upendra Baxi Bombay, 1979.
Kriminologi, Prof. DR. I.S. Susanto, SH.
Negara, Ridwan HR, PT. Griya Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
System Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945.
Ellydar Chaidir, SH., MH, 2008.
Teori Hukum dan Peradilan, Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH, Prenada Media Group.
Agustus, 2009.

PROFIL DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH KOTA DUMAI;

Suatu Studi Kasus

Oleh :

Syahrul Akmal Latif, DR
Dosen Jurusan Kriminologi

Fisipol – Universitas Islam Riau
Pekanbaru

H.M. Herdi Salioso, DR., MA., SE
Dosen Luar Biasa Jurusan Kriminologi

Fisipol – Universitas Islam Riau,
Serta bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau

Abstract

Dumai City is one of the level II in Riau province that has various advantages that is not owned by other regions, both geographically and demographically. However, the progress of Dumai city is also resulted in the formation of a slum area, where the population in this area is very far from prosperous, where the social welfare in society is the most absolute embodied in any development process.

A variety of indicators used to measure the level of social welfare in a community, especially those living in slum areas. To that end, the most important thing to note is regarding the public profile. Because by looking at the community profile will be known socio-economic status and their socio-cultural attitudes that can be used as a tool for social welfare. Description and analysis of this study is expected to answer the problems faced by slum communities relating.

Keywords : Level of social welfare, slum communities.

juga terjadi adalah adanya anggapan bahwa di kota sangat banyak tersedia lapangan kerja dan tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dan sarana rekreasi serta adanya anggapan lain bahwa kota memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi.

Berbagai faktor yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk di perkotaan pada akhirnya memang tidak bisa dielakkan yang pada gilirannya akan tumbuh subur permukiman-permukiman liar di perkotaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi menjamurnya permukiman liar dimaksud, baik berupa penyediaan rumah baru melalui fasilitas KPR-BTN, program-program rehabilitasi rumah kumuh, terutama peremajaan melalui Inpres 5 tahun 1990, program penyediaan Rumah Sangat Sederhana (RSS) agar dapat menekan tumbuhnya rumah kumuh atau permukiman liar di perkotaan. Ramlan Surbakti (1994; 65) menyatakan karakteristik permukiman liar adalah :

1. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi di perdesaan.
2. Perkampungan tersebut dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau berproduksi subsistens yang hidup dibawah garis kemiskinan.
3. Permukiman di wilayah tersebut, merujuk pada kualitas rumah darurat (*substandard housing conditions*)
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah.
5. Langkanya pelayanan kota (*urban service*).
6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknyaapun tidak teratur dan terurus.
7. Penghuni perkampungan miskin ini mempunyai gaya hidup perdesaan.
8. Secara sosial, mereka terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya.
9. Berlokasi disekitar pusat kota dan seringkali tidak jelas status hukum tanah yang ditempatinya.

Profil masyarakat permukiman kumuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti tersebut secara konseptual menyiratkan bahwa mereka yang tinggal di permukiman kumuh adalah orang-orang yang karena salah satu sebab tertentu berpenghasilan rendah, yang tentu secara teoritis akan membawa implikasi pada sulitnya mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada gilirannya memberikan indikasi pada rendahnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat dimana mereka bertempat tinggal, karena :

1. Lingkungan keluarga miskin tidak dapat memperkembangkan pola sosial yakni suatu pola dimana seseorang dibimbing untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Biasanya cara-cara mencari nafkah dari keluarga miskin diarahkan oleh adanya ketidak-pastian dan ketidak-mantapan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.
2. Lingkungan keluar miskin biasanya ditandai oleh tidak adanya pekerjaan yang tetap dan langgeng.
3. Kondisi kemiskinannya menyebabkan mereka (secara sadar atau tidak) hanya bisa mempunyai aspirasi yang terbatas, apa yang dapat mereka ajarkan kepada anak-anak mereka dalam proses sosialisasi hanyalah keterampilan-keterampilan yang memungkinkan anak-anak mereka sekedar melangsungkan cara hidup keluarganya yang sekarang.
4. Suatu aspek penting dalam sosialisasi bahwa keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya agar ia dapat menahan pemuasan kepuasaan mendadatkan kebutuhan-kebutuhannya yang utama.
5. Kondisi kemiskinan yang ada, pada dasarnya ditandai oleh keterbatasan untuk memungkinkan proses sosialisasi yang dapat menumbuhkan rasa keterikatan emosional di lingkungan keluarga tanpa terganggu yang jelas dan tanpa memiliki tempat tinggal yang pasti dan tanpa yang cukup untuk dapat hidup sendiri dan lepas dari bimbingan orang tua (Saparinah Sadli, 1986; 128).

Implikasi logis dari kenyataan teoritis diatas, adalah sulitnya v permukiman kumuh secara mikro mensejahterakan kehidupan keluarga mereka secara makro sulit pula mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial tentunya berisi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah serta sosial.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian yang disampaikan diatas, dapatlah diidentifikasi masalah yang terjadi antara lain :

1. Bagaimanakah gambaran sebenarnya lingkungan permukiman kumuh secara fisik.

2. Bagaimanakah gambaran sebenarnya lingkungan permukiman kumuh secara sosial.
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh secara fisik dan secara sosial.
4. Bagaimanakah sikap-sikap sosial masyarakat permukiman kumuh.
5. Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat permukiman kumuh tersebut.
6. Bagaimana gambaran tentang taraf kesejahteraan sosial masyarakat permukiman kumuh tersebut.

BATASAN MASALAH

Untuk lebih fokusnya pembahasan terhadap penelitian ini, maka penulis membatasi pada tinjauan profil masyarakat permukiman kumuh dari segi non materi dan tinjauan aspek kesejahteraan sosial masyarakat yang bersifat materi.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dengan memperhatikan batasan masalah yang diajukan, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran tentang profil masyarakat permukiman kumuh.
2. Bagaimanakah gambaran tentang kesejahteraan sosial masyarakat permukiman kumuh.
3. Apakah profil masyarakat permukiman kumuh berkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat permukiman kumuh tersebut.

KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan informasi, terutama bagi pemerintah selaku stakeholder maupun pihak-pihak lain dalam rangka penyusunan kebijakan-kebijakan sosial terutama di bidang perumahan dan kesejahteraan yang terkait dengan pengembangan lingkungan perumahan bagi keluarga miskin sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara lebih layak.

LANDASAN TEORI

Permukiman Kumuh.

Permukiman di dalam pengertian Indonesia sama dengan kampung, perkampungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001); perkampungan secara etimologi berarti dusun, desa atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota yang biasanya kurang bagus. Sedangkan dari teori, menurut Herlianto (Kompas, Mei 1991, halaman 4) dikatakan perkampungan mempunyai arti daerah perdesaan yang masih mempunyai ciri-ciri tradisional yang kuat dan masih berorientasi agraris.

Permukiman kumuh (*slums area*) menurut Orville F. Crime (1982) identik dengan perkampungan miskin, merupakan konseptualisasi dalam ilmu sosial yang pengertiannya sebenarnya masih kabur karena banyak pakar ilmu sosial mengartikannya dari segi fisik semata yang ditunjukkan dari hal-hal negatif seperti kotor, becek, sering banjir, rumah yang ditempati terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan lain sebagainya. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Bergel (1970; 40) yang mengatakan bahwa *slums area* adalah kawasan permukiman yang diatasnya terletak bangunan-bangunan yang berkondisi *sub-standard* dan dihuni oleh penduduk miskin yang padat.

Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Menurut R. Bintarto (1984; 111), Kesejahteraan Sosial dalam kehidupan masyarakat dapat diukur melalui beberapa aspek diantara :

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti : rumah, bahan pangan, tenaga, bahan pangan, dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti : kesehatan, lingkungan alam, dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti : fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti : moral, etika, keserasuaian dan sebagainya.

Dalam mengukur kesejahteraan sosial tersebut, menurut Keolle (lihat Bintarto, 1984; 111) ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan :

- 1) Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik seperti : nutrisi, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya.

- 2) Dengan melihat pada tingkat mental seperti : pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosialnya.

Kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat haruslah diwujudkan melalui usaha-usaha yang terorganisir dan timbal balik, agar benar-benar dapat terpenuhi sebagaimana aspek-aspek yang disebutkan diatas. Usaha timbal balik melalui suatu kegiatan yang terorganisir dengan fokus timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial dimana mereka berada. Hal ini mengandung pengertian, apabila kita ingin memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang berada di permukiman kumuh tersebut, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, lingkungan sosial disana harus diperbaiki bersama karena slums fisik selalu berkait erat dengan slums sosial. Oleh karena itu, memperbaiki salah satu maka yang lain juga harus sama diperbaiki.

KERANGKA BERFIKIR

Kesejahteraan sosial mungkin sesuatu yang dikhayalkan dalam kehidupan masyarakat. Namun usaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat tersebut terus dilakukan melalui pemenuhan berbagai aspek yang melingkupinya seperti terjaminnya kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dihadapi, upaya untuk lepas dari budaya tradisi dan keluar dari kemelaratan walaupun terasa begitu berat. Oleh karena itu, perwujudan kondisi sebagaimana yang diinginkan diatas paling tidak memberikan sedikit jawaban bagi perwujudan kondisi tersebut. Namun harus disadari, bahwa profil masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh secara sosial kultural sulit sekali melepaskan diri dari budaya tradisi yang mendekati "kemelaratan" bahkan tidak jarang secara ekonomi mereka disebut sebagai parasit sedangkan secara politis mereka dikatakan sebagai orang-orang apatis dan tidak terintegrasi yang seolah-olah suatu pekerjaan tidak mungkin untuk diwujudkan.

Walaupun demikian, kenyataan konseptual mengindikasikan hal-hal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang sudah barang tentu mengalami pergeseran nilai-nilai dan sikap-sikap sosial yang dimungkinkan yang menjadi fokus dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Kajian dan Teknik Analisa Data

Kajian ini merupakan kajian studi kasus tentang Profil Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Permukiman Kumuh Kota Dumai.

Setelah data-data dan informasi yang dibutuhkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang ada dengan menggunakan teknik analisa data :

1. Teknik Analisa Statistik Tabel Frekuensi.
2. Teknik Analisa Statistik Tabel Silang.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang terbesar di kawasan permukiman kumuh kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yaitu berjumlah 345 KK. Dari populasi tersebut, melalui teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling melalui keterbatasan 10 persen sehingga sampel yang digunakan adalah sebanyak $10\% \times 345 \text{ KK} = 34,5 \text{ KK}$ (dibulatkan saja menjadi 30 KK).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi :

Wawancara Terstruktur

Pengumpulan data melalui kaedah wawancara berdasarkan sampel responden yang telah dipilih dari seluruh ketua keluarga pada kawasan permukiman kumuh, sehingga maklumat yang sifatnya sensitif dapat digali dengan baik dan benar daripada responden. Metode wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terperinci tentang latar belakang sejarah, cara hidup dan sebagainya dari responden yang dipilih.

Observasi

Observasi diperlukan juga untuk mendapatkan informasi penting melalui pencatatan atas dasar pengamatan terhadap kondisi lingkungan sosial, ekonomi masyarakat dengan tujuan menunjang perolehan data pada waktu wawancara.

Kajian Perpustakaan

Kajian perpustakaan bertujuan untuk mengesan dan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan sejarah yang berkaitan dengan apa yang hendak dikaji, juga kaedah ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang pernah ditulis oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, khususnya mengenai perubahan pola stratifikasi sosial yang terjadi.

Defenisi Operasional.

Agar memudahkan dalam menganalisa dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terutama dalam peristilahan yang digunakan, maka penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Profil; merupakan keseluruhan aspek yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang yang mempengaruhi sikap tindak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari.
2. Permukiman Kumuh; merupakan suatu kawasan yang dicirikan dengan kondisi fisik yang berada dibawah standard umumnya dari suatu kelayakan permukiman. Sementara dilihat dari segi sosial, dicirikan dengan masih berkembangnya budaya tradisi dan budaya kemiskinan.
3. Kesejahteraan sosial masyarakat; kondisi terpenuhinya aspek-aspek kebutuhan hidup masyarakat setempat, baik dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental maupun segi spritual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat profil Status Sosial Ekonomi Masyarakat sangat diperlukan data mengenai indeks pendidikan, pekerjaan dan pendapatan karena ketiga indikator ini dengan membandingkannya terhadap jumlah anggota keluarga alam satu rumah tangga akan memberikan gambaran kepada kita pencapaian taraf kesejahteraan. Apabila indeks ketiga profil keluarga dari status ekonomi itu baik, maka akan baik pula kemungkinan reponden mencapai taraf kesejahteraannya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas pendidikan responden adalah rendah dan sebahagian besar bekerja sebagai buruh harian, pedagang, tukang becak, montir dan sedikit ditemukan pegawai negeri sipil. Begitu juga dengan tingkat pendapatan mereka kebanyakan adalah rendah dengan jenis keluarga extended family.

Profil Sikap Sosial

Untuk melihat seberapa jauh responden masih terikat pada pola tradisi melalui aspirasi mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan anak, anggapan responden terhadap perolehan pendapatan, anggapan terhadap kekuatan menentukan keberhasilan, anggapan responden terhadap masa depan. Keseluruhan hal tersebut diasumsikan untuk mengukur aspirasi sosial, orientasi terhadap nilai sosial dan fatalisme.

Dari hasil analisa data, kebanyakan mereka berharap pendidikan anak mereka harus lebih tinggi dari mereka, dan mereka berharap anak-anak mereka tidak bekerja seperti yang mereka lakukan saat ini dan mereka merasa pendapatan yang diperoleh saat ini sangat kurang memadai, dan hanya dengan kekuatan mereka serta perlindungan tuhan nasib mereka akan berubah serta untuk masa depan harus diusahakan lebih baik tidak terserah kepada nasib. Mereka juga sudah mengenal Puskesmas sebagai institusi menjaga kesehatan mereka, namun demikian mereka juga masih percaya kepada dukun. Manakala pendapatan yang diterima sebahagian besarnya digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan sedikit sekali bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya biaya pendidikan dan tidak ada pendapatan yang dialokasikan untuk rekreasi dan tabungan khusus. Pada umumnya mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dasar mereka.

Hubungan Antara Profil Masyarakat Permukiman Kumuh Dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial

Dari paparan data yang diungkapkan diatas, terlihat adanya hubungan antara profil masyarakat dan kesejahteraan sosial mereka. Terdapat adanya beberapa nilai-nilai sosial yang masih bertahan disamping terdapat juga beberapa nilai-nilai sikap sosial yang mengalami pergeseran-pergeseran dan secara tidak langsung memperlihatkan adanya hubungan dengan kondisi sosial ekonomi mereka yang jauh dari sebutan layak.

Kendati sukar menentukan mana yang paling dominan antara pendidikan, pekerjaan dan pendapatan terutama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat, namun asumsi utama nampaknya mengarah ke pendidikan sebagai faktor terpenting. Hal ini dibuktikan dengan pendidikan rendah menghasilkan aspirasi yang relatif juga rendah. Orang tua seringkali dia

berhasil apabila anak-anak mereka tidak melakukan jenis pekerjaan, memiliki pendidikan dan penghasilan yang tidak seperti apa yang mereka lakukan saat ini.

KESIMPULAN

Di Kota Dumai, masalah permukiman kumuh merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Kawasan kumuh di Kota Dumai banyak terjadi terutama di daerah-daerah sekitaran tanah konsesi PT. Caltex Pacific Indonesia, dimana tanah-tanah yang tidak terurus oleh perusahaan minyak tersebut diduduki oleh masyarakat terutama masyarakat pendatang, yang mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat tinggal yang jumlahnya sangat banyak. Ada beberapa kelurahan di Kota Dumai yang mempunyai kawasan permukiman kumuh yang mempunyai hubungan dengan tanah konsesi tersebut, sebut saja Kelurahan Buluh Kasap, Kelurahan Teluk Binjai, Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Bukit Datuk. Persoalan kepemilikan lahan antara warga masyarakat dan PT. CPI sampai hari belum pernah menemui titik terangnya (Herdi, 2007; 3).

Persoalan tanah konsesi ini diperburuk dengan semakin banyaknya pendatang ke Kota Dumai dikarenakan peningkatan taraf Kota Dumai menjadi daerah tingkat II, juga karena industrialisasi, sektor pelabuhan dan semakin lancarnya jalur transportasi darat, laut dan udara di Kota Dumai karena Kota Dumai memiliki letak yang sangat strategis.

Profil masyarakat permukiman kumuh atas dasar indikator umum berupa pendidikan, pekerjaan dan pendapatan menunjukkan kondisi dibawah standard kelayakan. Relatif rendahnya status sosial ekonomi mereka secara fisik dapat dilihat dari lingkungan dimana mereka tinggal. Profil masyarakat permukiman kumuh yang dilihat dari segi sikap-sikap sosial dan keterikatan pada tradisi dan nilai-nilai budaya, mengalami pergeseran pada beberapa aspek, namun belum dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena orientasi dan sikap sosial mereka terutama aspirasi terhadap pendidikan dan pekerjaan anak masih sesuatu yang jauh dari jangkauan pemikiran mereka.

SARAN

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengentasan Kemiskinan harus diupayakan terlaksana pada kelompok masyarakat di permukiman kumuh

mengingat keberadaan mereka di tengah kota, sudah pasti akan memberikan negatif terhadap penataan Kota Dumai. Penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan yang menyentuh hajat hidup masyarakat di permukiman kumuh harus segera di gesa terutama masalah air bersih, sanitasi, listerik, pendidikan dan gang serta bantuan modal usaha dan pembinaan dan bimbingan berusaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Provinsi Riau, *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Riau*. Penerbit Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2006.
- Bappeda Provinsi Riau, *Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2008*, Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2004.
- Bappeda Kota Dumai, *Dumai Dalam Angka*, Pemerintah Pemerintah Kota Dumai, 2006.
- Bianpoen, *Menata Kota dan Pemukiman Buruk*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1991.
- Chamhuri Siwar dan Noraini Hj. Idris, *Kemiskinan dalam arus pembangunan ekonomi Malaysia*, Penerbit UKM, Bangi, 1996.
- E.E. Bergel, *The Nature of Slums*, Popular Prakashan, Bombay, 1970.
- Herdi Salioso, *Dumai Mutiara Pantai Timur Sumatera*, Penerbit UNRI, Pekanbaru, 2002.
- Herdi Salioso, *Dari Pemikiran Raffles sampai FTZ Dumai*, Penerbit Yayasan AKRAB Pekanbaru, 2007.
- Herdi Salioso, *Dari FTZ Dumai sampai Visi Riau 2020*, Penerbit Yayasan AKRAB Pekanbaru, 2007.
- Herdi Salioso, *Upaya Meningkatkan Kinerja Masyarakat Melayu Kota Dumai*, Penerbit Yayasan AKRAB, Pekanbaru, 2008.
- Herlianto, *Perbaikan Kampung perlu ditangani oleh semua pihak*, Kompas, Mei 1991.
- Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1986.

- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1982.
- Orville F. Crime, *Housing for Low Urban Families Economic and Policy in Developing World*, Terj. Endang Purwaningsih, UI Press, Jakarta, 1982.
- R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ramlan A. Surbakti, *Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung*, Prisma No. 6, LPES, Jakarta, 1984.
- Saparinah Sadli, *Perilaku Gelandangan dan Penanggulangannya*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Siswono Yudohusodo, *Tumbuhnya Pemukiman pemukiman liar di Daerah Perkotaan sebagai akibat dari urbanisasi yang tinggi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No. 1, PAU-UI, Jakarta, 1991.
- Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Said Hussein Alatas, *Mitos Pribumi Malas*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1988.
- Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

LATAR BELAKANG PSIKOLOGI KORUPTOR

Oleh :

Raihana, MA., SH

Dosen Luar Biasa Jurusan Kriminologi

Fisipol – Universitas Islam Riau

Abstract

The corruption problem is a complex issue and runs along from generational generation, growing even faster than its eradication efforts. Eradication efforts which had been running is always limped behind the growth rate tactics and strategy of the perpetrators of corruption. Corruption in Indonesia grows systemically. For some people corruption is no longer a violation has become a habit. It's because the perpetrators of corruption have been to measure and consider carefully and rationally using the formula $SU = (S) \times (G) - (p) (F) \times (L)$, whereas according to the formula, the act of corruption would easily occur if the probability of success in doing corruption is greater than the chance of failure, it means that corruption behavior will be made if the acquisition (Gain) corruption is greater than the value of loss (Loss).

Keywords : *corruption, corruption behavior, perpetrators of corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi selalu menjadi topik yang paling hangat dan cukup sering diperbincangkan, baik melalui forum-forum diseminasi maupun dalam forum-forum diskusi. Baik ditingkat RT sampai ke tingkat Pemerintahan negara yang juga tidak ketinggalan turut memikirkan korupsi diberantas. Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruption* dari kata kerja *Corruptere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Sedangkan secara Har